

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan didasarkan adanya kebijakan standar harga baru yang mempengaruhi pendapatan dan belanja tahun 2025 serta didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- Keadaan yang menyebabkan defisit anggaran tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran untuk tahun berjalan;
- Kondisi sarana prasarana penunjang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipandang prioritas; dan
- Perubahan rekening belanja dan besaran standart harga serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2025. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025. Sehingga penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan BKPSDM Tahun 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perumusan rancangan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- dan c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Renja sampai dengan Tribulan II Tahun Berkenan
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV	Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Triwulan I terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2025.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 13.326.062.363,- (*Tiga belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) yang berasal dari APBD Kota Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 7 (tujuh) sub kegiatan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan Program Kepegawaian Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan.
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan

Sampai dengan tribulan I tahun anggaran 2025 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.385.921.848,- atau 25,03%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan I relatif rendah dikarenakan:

- Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga terjadi efisiensi anggaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 menggunakan Coretax System namun aplikasi tersebut masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, sehingga proses pertanggungjawaban kegiatan terhambat;
- Pihak penyedia barang/jasa terkendala oleh Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6, namun aplikasi masih belum terbangun sempurna;
- Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, antara lain: Pengadaan CASN, pengiriman peserta peningkatan kompetensi disesuaikan dengan instansi pembina/penyelenggara diklat dan uji kompetensi pada tribulan III dan IV.

Tabel. 2.1.
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penangu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (12/5) x 100%		14
	TUJUAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,38		86,37		86,37		86,65				86,65		100,32		100,3 2		116,1 4		BKPSDM
	SASARAN 1: MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,38		86,37		86,37		86,65				86,65		100,32		100,3 2		116,1 4		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,00	7.395.425.440, 00	88,05	8.705.610.630, 00	83,75	8.835.948.799, 00	95,05	2.011.071.824, 00	0,00	0,0 0	95,05	2.011.071.824, 00	113,5	22,8	95,05	10.716.682.454, 00	113,2	144,9	BKPSDM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,0 0	10.032.500,00	100,0 0	9.486.600,00	100	9.175.500,00	25,00	1.375.000,00	0,00	0,0 0	25	1.375.000,00	25,0	15,0	25	1.375.000,00	25,0	13,7	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	40	7.068.000,00	20	6.524.000,00	10	6.211.000,00	3	1.375.000,00	0,00	0,0 0	3	1.375.000,00	30,0	22,1	23	7.899.000,00	57,5	111,8	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	32	2.964.500,00	16	2.962.600,00	8	2.964.500,00	4	0	0,00	0,0 0	4	0	50,0	0,0	20	2.962.600,00	62,5	99,9	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	40,00	11,07					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100,0 0	8.357.549.689, 00	100,0 0	7.605.597.307, 00	100	8.090.979.199, 00	25,00	1.927.954.862, 00	0,00	0,0 0	25	1.927.954.862, 00	25,0	23,8	25	1.927.954.862,0 0	25,0	23,1	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	414	8.355.549.689, 00	104	7.603.597.307, 00	98	8.053.798.299, 00	98	1.927.954.862, 00	0,00	0,0 0	98	1.927.954.862, 00	100,0	23,9	202	9.531.552.169,0 0	48,8	114,1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	48	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	1.800.000,00	3	0	0,00	0,0 0	3	0	25,0	0,0	15	2.000.000,00	31,3	100,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	62,5	12,0					
Predikat kinerja																	Rendah	Sangat Rendah					

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (12/5) x 100%		14	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00	250.798.100,00	100,00	223.616.000,00	100	143.108.900,00	25,00	4.680.000,00	0,00	0,00	25	4.680.000,00	25,0	3,3	25	4.680.000,00	25,0	1,9	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	8	50.000.000,00	3,00	49.680.000,00	2	1.464.956.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	3	49.680.000,00	37,5	99,4	
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	160	78.709.100,00	40,00	59.458.000,00	40	73.379.900,00	40,00	1.700.000,00	0,00	0,00	40	1.700.000,00	100,0	2,3	80	61.158.000,00	50,0	77,7	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	160	122.089.000,00	45,00	114.478.000,00	40	11.133.000,00	40,00	2.980.000,00	0,00	0,00	40	2.980.000,00	100,0	26,8	85	117.458.000,00	53,1	96,2	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	66,7	9,7					
Predikat kinerja																	Sedang	Sangat Rendah					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesetiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	450.075.950,00	100,00	509.360.558,00	100	379.489.100,00	25,00	45.337.794,00	0,00	0,00	25	45.337.794,00	25,0	11,9	25	45.337.794,00	25,0	10,1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	30.994.100,00	3,0	24.562.425,00	3	29.040.500,00	1	6.122.675,00	0,00	0,00	1	6.122.675,00	33,3	21,1	4	30.685.100,00	33,3	99,0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	6.428.000,00	1,0	6.138.600,00	1	5.983.800,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	1	6.138.600,00	25,0	95,5	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	144	50.406.000,00	36,0	43.893.500,00	12	32.400.000,00	3	1.961.000,00	0,00	0,00	3	1.961.000,00	25,0	6,1	39	45.854.500,00	27,1	91,0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	42.987.600,00	2,0	33.487.875,00	2	29.185.000,00	1	0	0,00	0,00	1	0	50,0	0,0	3	33.487.875,00	25,0	77,9	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	96	8.553.000,00	36,0	6.600.000,00	24	8.553.000,00	6	930.000,00	0,00	0,00	6	930.000,00	25,0	10,9	42	7.530.000,00	43,8	88,0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	146	299.997.250,00	60,0	386.110.158,00	48	203.200.700,00	9	36.324.119,00	0,00	0,00	9	36.324.119,00	18,8	17,9	69	422.434.277,00	47,3	140,8	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	10.710.000,00	1,0	8.568.000,00	1	430.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	1	8.568.000,00	25,0	80,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	21,7	8					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100,00	28.976.660,00	100,00	170.400.000,00	100	63.612.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	100	170.400.000,00	100,0	588,1	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	8	0	0,0	0	5	34.740.200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	0	0,00	0,0	#DIV/0!	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	28.976.660,00	13,0	170.400.000,00	6	28.872.200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	13	170.400.000,00	65,0	588,1	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100,00	68.209.000,00	100,00	66.341.008,00	100	70.756.000,00	25,00	22.941.268,00	0,00	0,00	25	22.941.268,00	25,0	32,4	125	89.282.276,00	125,0	130,9	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (12/5) x 100%		14
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	40	67.254.000,00	12,0	66.341.008,00	12	106.134.000,00	3,0	22.941.268,00	0,0	0,0	3	22.941.268,00	25,0	21,6	15	89.282.276,00	37,5	132,8	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	25	21,6					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	110.612.600,00	100,00	120.809.157,00	100	78.827.700,00	25,00	8.782.900,00	0,00	0,00	25	8.782.900,00	25,0	11,1	125	129.592.057,00	125,0	117,2	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	40	74.862.600,00	10,0	85.424.157,00	10	43.963.700,00	3,0	8.782.900,00	0,00	0,00	3	8.782.900,00	30,0	20,0	13	94.207.057,00	32,5	125,8	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	388	35.750.000,00	80,0	35.385.000,00	62	29.614.000,00	10,0	0	0,00	0,00	10	0	16,1	0,0	90	35.385.000,00	23,2	99,0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	23,1	10					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	21,4	13,9					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Koordinasi lintas sektor/ bidang yang baik. sehingga pelaksanaan program berjalan baik. 2. pelayanan kepada pengguna layanan BKPSDM yang semakin baik. yang ditunjukkan dengan hasil survei kepuasan pengguna layanan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya efisiensi dan pergeseran anggaran di awal tahun, menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : penyesuaian dengan penggunaan anggaran sesuai dengan SE Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -																							
	SASARAN 2: MENINGKATNYA TATA KELOLA KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BAIK		Indeks Sistem Merit	Indeks	300,00		271,50		290,00		271,50		0,00		271,50		0,94		543	0,00	0,94		BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	91,58	10.282.789.026	84,00	1.759.856.375	93,06	1.762.741.150	98,90	126.747.940	0,00	0,00	98,9	126.747.940	106,3	7,2	183	1.886.604.315	199,7	18,3	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	74,00	10.282.789.026	80,34	1.759.856.375	48,21	1.762.741.150	15,00	126.747.940	0,00	0,00	15	126.747.940	31,1	7,2	95	1.886.604.315	128,8	18,3	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	78,00	10.282.789.026	101,65	1.759.856.375	67	1.762.741.150	80,34	126.747.940	0,00	0,00	80,34	126.747.940	119,9	7,2	182	1.886.604.315	233,3	18,3	BKPSDM

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (12/5) x 100%		14
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	50,50	10.282.789.026	37,37	1.759.856.375	91,38	1.762.741.150	91,18	126.747.940	0,00	0,00	91,18	126.747.940	99,8	7,2	129	1.886.604.315	254,6	18,3	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	94,66	10.282.789.026	98,90	1.759.856.375	48,74	1.762.741.150	37,37	126.747.940	0,00	0,00	37,37	126.747.940	76,7	7,2	136	1.886.604.315	144,0	18,3	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid	%	51,01	10.282.789.026	87,10	1.759.856.375	73	1.762.741.150	84,00	126.747.940	0,00	0,00	84	126.747.940	115,1	7,2	171	1.886.604.315	335,4	18,3	BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100,00	1.260.289.400	100,00	1.281.372.900	100	1.197.347.050	30,00	109.675.500	0,00	0,00	30	109.675.500	30,0	9,2	130	1.391.048.400	130,0	110,4	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola	%	20,00	1.260.289.400	100,00	1.281.372.900	95	1.197.347.050	25,00	109.675.500	0,00	0,00	25	109.675.500	26,3	9,2	125	1.391.048.400	625,0	110,4	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	%	95,00	1.260.289.400	85,40	1.281.372.900	20	1.197.347.050	0,00	109.675.500	0,00	0,00	0	109.675.500	0,0	9,2	85	1.391.048.400	89,9	110,4	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	4	551.574.400	1	573.340.900	2	523.395.350	1	62.677.500	0,00	0,00	1	62.677.500	)	12,0	2	636.018.400	50,0	115,3	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	48	35.681.900	12	17.135.900	12	29.277.600	3	0	0,00	0,00	3	0	25,0	0,0	15	17.135.900	31,3	48,0	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga	4	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	1	400.000.000	25,0	100,0	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	208.336.900	1	232.974.000	12	194.674.100	3	46.998.000	0,00	0,00	3	46.998.000	25,0	24,1	4	279.972.000	33,3	134,4	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	#NAME?	9					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	%	70,00	413.340.900,00	76,14	276.203.775,00	70	366.678.800,00	20,00	6.233.940,00	0,00	0,00	20	6.233.940,00	28,6	1,7	96	282.437.715,00	137,3	68,3	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	16	413.340.900,00	4	276.203.775,00	4	366.678.800,00	1	6.233.940,00	0,00	0,00	1	6.233.940,00	25,0	1,7	5	282.437.715,00	31,3	68,3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	25	1,7					
Predikat kinerja																	Sangat Rendah						
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	%	30	185.172.500,00	19,79	147.300.800,00	10	126.836.200,00	2,00	7.798.500,00	0,00	0,00	2	7.798.500,00	20,0	6,1	22	155.099.300,00	72,6	83,8	
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	48	185.172.500,00	12	147.300.800,00	12	126.836.200,00	3	7.798.500,00	0,00	0,00	3	7.798.500,00	25,0	6,1	15	155.099.300,00	31,3	83,8	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun2025 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (6+10)		13 = (12/5) x 100%		14	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														25	6,1								
Predikat kinerja														Sangat Rendah									
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	%	96,16	89.680.700,00	99,08	54.978.900,00	94,56	71.879.100,00	22,00	3.040.000,00	0,00	0,00	22	3.040.000,00	23,3	4,2	121	58.018.900,00	125,9	64,7	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	8	38.610.500,00	2	19.206.200,00	2	38.590.500,00	0	1.940.000,00	0,00	0,00	0	1.940.000,00	0,0	5,0	2	21.146.200,00	25,0	54,8	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	800	7.531.200,00	214	2.331.900,00	200	5.661.900,00	141	0	0,00	0,00	141	0	70,5	0,0	355	2.331.900,00	44,4	31,0	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan	48	9.312.600,00	12	5.457.000,00	12	35.626.700,00	3	1.100.000,00	0,00	0,00	3	1.100.000,00	25,0	3,1	15	6.557.000,00	31,3	70,4	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														31,8	2,7								
Predikat kinerja														Sangat Rendah									
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														21,4	6,6								
Predikat kinerja														Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Pelayanan kepegawaian digital, khususnya yang terintegrasi telah berjalan dengan baik. 2. terpenuhinya data kepegawaian yang sesuai.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : realisasi penyerapan anggaran terhambat, dikarenakan adanya penyesuaian dengan aturan baru. dimana penggunaan aplikasi e-cortex yang terintegrasi dengan Inaproc versi 6																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Persiapan untuk tahapan seleksi CASN tahap kedua tahun 2024																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -																							
	SASARAN 3: MENINGKATNYA KOMPETENSI ASN		Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	%	18,15		14,73		16,40		15,00		30,00			2		15		2		BKPSDM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	96,85	180.223.877,00	0,00	1.006.553.605,00	48,21	2.183.322.400,00	15,00	109.743.285,00	0,00	0,00	15	109.743.285,00	31,1	5,0	15	1.116.296.890,00	15,5	619,4	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	50,5	180.223.877,00	0,00	1.006.553.605,00	48,74	2.183.322.400,00	37,37	109.743.285,00	0,00	0,00	37,37	109.743.285,00	76,7	5,0	37	1.116.296.890,00	74,0	619,4	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	%	51,01	629.851.192,00	2,08	553.354.945,00	1,20	552.437.500,00	0,00	109.743.285,00	0,00	0,00	0	109.743.285,00	0,0	19,9	2	663.098.230,00	4,1	105,3	
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	48	14.418.600,00	12	8.550.400,00	12	10.569.500,00	3	0	0,00	0,00	3	0	25,0	0,0	15	8.550.400,00	31,3	59,3	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	4150	520.804.992,00	2715	496.037.045,00	1050	550.383.575,00	0	109.743.285,00	0,00	0,00	0	109.743.285,00	0,0	19,9	2715	605.780.330,00	65,4	116,3	

Pada tabel diatas, terdapat kinerja yang memiliki implikasi positif terhadap peningkatan kompetensi pegawai, diantaranya:

1. Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1 Tahun 2025 sebanyak 30 (tiga puluh) orang ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1 diikuti oleh 40 (empat puluh) orang, ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam terwujudnya *good governance* pada lingkup pemerintahan, memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran melalui penyediaan SDM yang mengelola barang/jasa yang kompeten dan berintegritas.
2. Pelaksanaan Assessment ASN pada 87 (delapan puluh tujuh) orang pelaksana, dengan harapan hasilnya dapat digunakan sebagai database talentpool, sebagai pertimbangan penataan pegawai serta sebagai dasar pemberian peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Namun terdapat juga implikasi yang timbul terhadap capaian program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jika hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perubahan perencanaan sebagai berikut:

1. Terdapat inkonsistensi dengan pelaksanaan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja;
2. Kekurangan pembayaran gaji pokok PNS, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi dan beban kerja serta tunjangan profesi, dan pembayaran tunjangan PPh;
3. Kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat kesalahan penempatan anggaran untuk pembelian kaos olahraga bagi ASN se Kota Blitar, yang dibebankan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,;

Atas dasar uraian diatas perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil antara lain:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja;
2. Pengadaan sarana prasarana kantor atas kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaan;

3. Penambahan kegiatan retreat Kepala Perangkat Daerah untuk penyatuan visi misi Walikota periode 2025-2030;
4. Penambahan diklat teknis bagi ASN pemberi layanan publik;
5. Pergeseran anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada sub Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai karena sasaran penerimanya seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6. Assessment pejabat eselon III.a dan eselon III.b untuk pejabat administrator yang telah habis masa berlaku hasil assessmentnya atau yang belum pernah assessment eselon III dan tambahan pejabat fungsional ahli muda/ ahli madya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 dapat memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran

Target sasaran pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan target perubahan ketiga pada Renstra 2021-2026 “Meningkatnya Kompetensi ASN”. Peningkatan capaian target kinerja tersebut salah satunya didorong dari terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 49, dimana Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran terintegrasi.

Terbitnya peraturan perundangan tersebut mendorong meningkatnya jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi, sehingga dengan alokasi anggaran yang tidak mengalami peningkatan namun secara kinerja meningkat secara signifikan. Adapun perubahan target kinerja tujuan yang mengalami perubahan sebagaiberikut:

**Tabel 3.1 Perubahan Target Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2025	
				sebelum	sesudah
Tujuan Renstra: Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dirilis BKN ditahun berkenaan	80,4	86,75
Sasaran Renstra: 1. Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Penilaian dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada Pemerintah Daerah.	Hasil Perhitungan Indeks Sistem Merit	290	290
Sasaran Renstra: 2. Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Tujuan dari peningkatan kapasitas ASN adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dan agar pembangunan tertata dengan baik.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN ----- x 100% Jumlah ASN	50,00%	50,00%
Sasaran Renstra: 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penerapan implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah di tahun berkenaan	A 86,37	A 86,37

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menambah target kinerja pada Tujuan Renstra yaitu Indeks Profesionalitas ASN yang semula ditargetkan 80,40 menjadi 86,75 hal ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN di akhir tahun 2024 sebesar 86,65.

3.2 Rencana Tindaklanjuti LKJIP Tahun 2024

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 selain melakukan penyesuaian atas target Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu difokuskan pada pemenuhan rencana tindaklanjuti yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga mempercepat pemenuhan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal – hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar lebih baik lagi. Adapun rencana tindaklanjuti tersaji dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Tindaklanjuti LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	meningkatkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN melalui sosialisasi ke seluruh ASN terutama pada pelaporan kinerja melalui pembentukan PIC dan movev pengukuran IP ASN	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	1). Melengkapi penyusunan talent pool melalui assessment pegawai	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center
		2). Menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai (diklat, praktik kerja/magang, coaching, mentoring) berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi.	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		3). Mengimplementasikan kebijakan pola karier dengan mengacu pada manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center
			Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN
		4). Melakukan assessment dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center
			Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN
		5). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja pegawai;	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		6). Memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk membangun manajemen talenta.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center
			Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		8). Menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian khususnya manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	1) Memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi dan hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		2). Menyusun Kebijakan Coaching dan Mentoring bagi ASN dengan kriteria tertentu.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		3). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen talenta sebagai sarana untuk mengetahui data talenta secara	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		realtime, menjaga kualitas talenta, meningkatkan motivasi dan kinerja talenta serta memberikan kepastian arah pengembangan karir talenta melalui aplikasi manajemen talenta di SIKOI.	Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		4). Memberikan akses, kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada seluruh ASN untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas untuk memperoleh pengembangan kompetensi berupa BK CorpU dan Tugas Belajar melalui pemanfaatan aplikasi SMEDI SIKOI untuk seluruh Perangkat Daerah.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		5). Perumusan pengembangan kompetensi ASN melalui penyusunan dokumen HCDP yang selaras dengan RPJMD.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1). Meningkatkan implementasi nilai – nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi disetiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2). Melakukan dialog Kinerja untuk menyusun rencana aksi organisasi.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3). Menyusun peta proses bisnis dan pohon kinerja secara lebih mudah dipahami dan dapat diukur.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan, terdapat 5 sub kegiatan (15,63%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 27 sub kegiatan (84,37%) mengalami perubahan anggaran (22 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 5 sub kegiatan mengalami penambahan pagu anggaran) di Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Mengalami Perubahan

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 indeks	83,75 indeks	10.166.360.199	8.645.528.558	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	9.175.500	8.865.500	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.000	5.901.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	8.055.598.299	8.056.602.258	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	93 Orang/bulan	8.053.798.299	8.054.802.258	penyesuaian nilai tunjangan dan pesangon PTT
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	1.549.469.300	59.612.300	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	1.464.956.400	6.300.000	Anggaran dialihkan pada sub kegiatan pemberian penghargaan dikarena sasaran penerima adalah ASN se Kota Blitar

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	73.379.900	50.112.300	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	40 Orang	11.133.000	3.200.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	308.793.000	253.813.400	
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.040.500	23.822.900	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39 Paket	32.400.000	30.200.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.185.000	14.400.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	14 Dokumen	8.553.000	3.350.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	203.200.700	175.626.700	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	34.740.200	78.161.000	penambahan mebel untuk ruang rapat BKPSDM
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	28.872.200	27.719.700	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	43.963.700	34.213.400	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	52 Unit	29.614.000	20.407.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	73% 48,21% 93,06% 91,385 67% 48,74 %	73% 48,21% 93,06% 48,74% 91,38% 67 %	1.770.741.150	2.374.068.380	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	100 % 20 % 95 %	100 % 20 % 95 %	1.197.347.050	1.002.555.000	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	523.395.350	353.656.000	penyesuaian kebutuhan fasilitasi CASN

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	12 Dokumen	29.277.600	14.978.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	450.000.000	400.000.000	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12 Dokumen	194.674.100	233.921.000	pemeliharaan mesin finger print yang mengalami kendala
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	366.678.800	350.673.700	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	10 %	10 %	126.836.200	49.387.100	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 Dokumen	12 Dokumen	126.836.200	49.387.100	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	94,56 %	94,56 %	79.879.100	971.452.580	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	38.590.500	30.028.700	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	3516 Orang	5.661.900	905.275.380	pembelian seragam olahraga ASN di lingkungan pemerintah Kota Blitar (pengalihan dari sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya)

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	35.626.700	36.148.500	kebutuhan untuk pembinaan disiplin pegawai
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,74 96,80 48,21 % % %	96,80 48,74 48,21 % % %	2.183.322.400	2.306.465.425	
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	10.569.500	2.504.500	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1050 Orang	1050 Orang	550.383.575	549.505.600	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2025		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	Renja Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	250 Dokumen	250 Dokumen	93.958.300	24.545.800	efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	12 %	12 %	1.528.411.025	1.729.909.525	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan	1.528.411.025	1.729.909.525	penambahan aktivitas retreat kepala OPD

3.4 Perubahan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 yang terdapat perubahan aktivitas disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pada anggaran gaji untuk pegawai tidak tetap yang telah berkurang karena diangkat menjadi PPPK dan telah memasuki usia pensiun;
2. Penyesuaian pada kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kinerja organisasi;
3. Penyesuaian pada kebutuhan diklat bagi pejabat struktural dan diklat bagi pejabat fungsional tertentu yang menjadi persyaratan pengampu jabatan;
4. Penyesuaian anggaran pada sub kegiatan sesuai sasaran sub kegiatan.
5. Efisiensi kegiatan yang telah berjalan.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 diarahkan pada:

- Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja;
- Kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaan.
- Penambahan kegiatan retreat Kepala Perangkat Daerah untuk penyatuan visi misi Walikota periode 2025-2030;
- Penambahan diklat teknis bagi ASN pemberi layanan publik;
- Pergeseran anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada sub Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai karena sasaran penerimanya seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025 terlihat dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4.
Perubahan Rumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			12.782.012.349	14.120.423.749	13.326.062.363						13.037.500.000			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.782.012.349	14.120.423.749	13.326.062.363						13.037.500.000			
	5	03				KEPEGAWAIAN			10.598.689.949	11.937.101.349	11.019.596.938						11.831.900.000			
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 indeks	83,75 indeks	8.835.948.799	10.166.360.199	8.645.528.558						9.768.200.000		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	9.175.500	9.175.500	8.865.500			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar		10.600.000	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.000	6.211.000	5.901.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			7.400.000	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	2.964.500	2.964.500	2.964.500	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			3.200.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	8.090.979.199	8.055.598.299	8.056.602.258			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar		8.802.200.00 0	BKPS DM
	5	03	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bu lan	93 Orang/b ulan	8.089.179.199	8.053.798.299	8.054.802.258	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			8.800.000.00 0	BKPS DM
	5	03	01	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			2.200.000	BKPS DM

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	143.108.900	1.549.469.300	59.612.300			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar		267.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	58.596.000	1.464.956.400	6.300.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			55.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40 Orang	40 Orang	73.379.900	73.379.900	50.112.300	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			83.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	75 Orang	40 Orang	11.133.000	11.133.000	3.200.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			129.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	100 %	100 %	379.489.100	308.793.000	253.813.400			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan	ASN BKPSDM Kota Blitar		462.400.000	BKPS DM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							standar									Investasi				
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.040.500	29.040.500	23.822.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			32.500.000	BKPS DM
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.983.800	5.983.800	5.983.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			6.800.000	BKPS DM
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39 Paket	32.400.000	32.400.000	30.200.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			53.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.185.000	29.185.000	14.400.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			35.000.000	BKPS DM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025			Nasiona l					Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													a							
	5	03	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokume n	14 Dokume n	8.553.000	8.553.000	3.350.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			8.900.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	273.896.800	203.200.700	175.626.700	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			315.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 6	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	430.000	430.000	430.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			11.200.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	63.612.400	63.612.400	105.880.700			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar		40.000.000	BKPS DM
	5	03	01	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab						
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l				Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	34.740.200	34.740.200	78.161.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi		9.500.000	BKPS DM				
	5	03	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	28.872.200	28.872.200	27.719.700	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi		30.500.000	BKPS DM				
	5	03	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	70.756.000	106.134.000	106.134.000			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar	70.500.000	BKPS DM				
	5	03	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.756.000	106.134.000	106.134.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi		70.500.000	BKPS DM				
	5	03	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	78.827.700	73.577.700	54.620.400			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN BKPSDM Kota Blitar	115.500.000	BKPS DM				
	5	03	01	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l				Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	03	02	2.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	100 % 20 % 95 %	100 % 20 % 95 %	1.197.347.050	1.197.347.050	1.002.555.000			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		1.336.500.00 0	BKPS DM					
	5	03	02	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokume n	2 Dokume n	523.395.350	523.395.350	353.656.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			580.000.000	BKPS DM					
	5	03	02	2.0 1	00 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokume n	12 Dokume n	29.277.600	29.277.600	14.978.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			37.500.000	BKPS DM					
	5	03	02	2.0 1	00 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembag a	450.000.000	450.000.000	400.000.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			450.000.000	BKPS DM					
	5	03	02	2.0 1	00 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokume n	12 Dokume n	194.674.100	194.674.100	233.921.000	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			269.000.000	BKPS DM
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70 %	70 %	366.678.800	366.678.800	350.673.700			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		435.000.000	BKPS DM
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokume n	4 Dokume n	366.678.800	366.678.800	350.673.700	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			435.000.000	BKPS DM
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	10 %	10 %	126.836.200	126.836.200	49.387.100			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		194.000.000	BKPS DM
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 Dokume n	12 Dokume n	126.836.200,00	126.836.200	49.387.100	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			194.000.000	BKPS DM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	94,56 %	94,56 %	71.879.100,00	79.879.100	971.452.580			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		98.200.000	BKPS DM
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokume n	2 Dokume n	30.590.500	38.590.500	30.028.700	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			40.500.000	BKPS DM
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	3516 Orang	5.661.900	5.661.900	905.275.380	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			7.900.000	BKPS DM
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	35.626.700	35.626.700	36.148.500	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			49.800.000	BKPS DM
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.183.322.400	2.183.322.400	2.306.465.425							1.205.600.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,74% 96,80% 48,21 %	96,80% 48,74% 48,21 %	2.183.322.400	2.183.322.400	2.306.465.425							1.205.600.00 0	
	5	04	02	2.0 1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20 %	1,20 %	552.437.500	654.911.375	576.555.900			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		641.100.000	BKPS DM
	5	04	02	2.0 1	00 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokume n	12 Dokume n	10.569.500	10.569.500	2.504.500	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			15.100.000	BKPS DM
	5	04	02	2.0 1	00 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1050 Orang	1050 Orang	447.909.700	550.383.575	549.505.600	Kota Blitar, Semua Kecama tan,	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan			527.000.000	BKPS DM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Semua Kel/Des a			Investasi				
	5	04	02	2.0 1	00 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	250 Dokume n	250 Dokume n	93.958.300	93.958.300	24.545.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			99.000.000	BKPS DM
	5	04	02	2.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	12 %	12 %	1.630.884.900	1.528.411.025	1.729.909.525			-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi	ASN dilingkung an Pemerinta h Kota Blitar		564.500.000, 0	BKPS DM
	5	04	02	2.0 2	00 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	5 Laporan	5 Laporan	1.630.884.900	1.528.411.025	1.729.909.525	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	Peningkata n Pelayanan Pemerintah an Berbasis Digital dan Investasi			564.500.000	BKPS DM

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025				Nasiona l				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kepemimpinan, dan Prajabatan													
	J U M L A H									12.782.012.349	14.120.423.749	13.326.062.363							13.037.500.000	

Sumber : SIPD BKPSDM Kota Blitar, April 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
- BKPSDM Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Blitar, 25 Juli 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



KUSNO, S.Sos
NIP. 196707221992021002